

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif**

###### *Collaborative Governance*

Pulau Belitung yang disebut dengan sebutan Negeri laskar Pelangi memiliki beragam obyek daya tarik wisata baik wisata pantai, alam, budaya, sejarah dan kesenian. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung terutama dalam pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Terong tentunya tidak bisa di kelola hanya dengan satu stakeholder, akan tetapi untuk pengelolaan Desa Wisata berbasis masyarakat di Desa Terong membutuhkan keterlibatan dari beberapa stakeholder baik itu Pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam ilmu administrasi negara konsep *collaborative governance* merupakan keterlibatan beberapa stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang diterapkan atau di implementasikan dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Terong, Kabupaten Belitung.

*Collaborative governance* yang dilaksanakan dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini dapat dilihat dari model kolaborasi menurut Anshel And Gash, dalam kolaborasi terdapat tiga peran aktor utama yang melakukan kolaborasi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, PT Bank Central Asia Tbk dan masyarakat Desa Wisata Terong, Kabupaten Belitung. untuk melihat

secara lebih rinci bagaimana *Collaborative Governance* dalam tata kelola Desa Wisata Terong ini dapat dilihat dalam pembahasan sebagai berikut :

Terdapat tiga keterlibatan peran aktor dalam *collaborative governance* pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu :

Sebagaimana wawancara yang di lakukan dengan ibu Annita selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung beliau menuturkan keterlibatan Dinas Pariwisata dalam tata kelola desa wisata terong yaitu :

“bahwa disini pemerintah yaitu Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Desa Wisata Terong perlu bekerja sama atau adanya keterlibatan dari beberapa pihak dalam pengembangan Desa Wisata Terong, baik masyarakat didesa itu sendiri maupun pihak swasta yang terlibat, seperti disini adanya keterlibatan bank BCA dalam pembantuan dana dan melakukan pelatihan karena keterbatasan pemerintah soal pendanaan dan memberikan pelatihan” (wawancara, 7 januari 2020)

Dari pemaparan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini tidak bisa berjalan tanpa adanya peran dari berbagai pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong, dari beberapa pihak tersebut seperti pemerintah, masyarakat maupun swasta. Adapun keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Terong tersebut antara lain :

#### 1. Pemerintah

Peran pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini merupakan bagian dari tanggung jawab mereka berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, maka dapat diuraikan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung memiliki peranan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis, sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugas, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Annita selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yaitu :

“bahwa disini Dinas Pariwisata berkewajiban bertugas untuk mencari potensi-potensi desa sesuai dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yaitu program Tusena yang merupakan program satu desa satu destinasi wisata yang kemudian dikembangkan menjadi pariwisata, yang dari sekian banyak desa di kabupaten belitung, maka Desa Terong lah yang memiliki banyak potensi sebagai Desa Wisata” ( wawancara, 7 januari 2020)

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara di atas bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung bertugas menjalankan kewajiban yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintah

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian dari program tersebut Desa Terong terpilih dan memiliki potensi yang mampu dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat adapun banyak dari potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Terong yaitu pemanfaatan bekas lahan tambang timah menjadi destinasi wisata, hutan mangrove, agrowisata dan wisata alam perbukitan yang dari semua potensi yang dimiliki oleh Desa Terong mampu dikembangkan oleh komunitas-komunitas yang ada di Desa Wisata Terong tersebut.

Adapun dari potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Terong ini kemudian oleh Dinas Pariwisata mendorong masyarakat untuk mengembangkan semua potensi yang ada seperti yang dikatakan oleh bu Annita Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dalam wawancara sebagai berikut :

“kemudian dari potensi yang ada di Desa Terong kami Dinas Pariwisata mendorong masyarakat untuk menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada yang memang Desa Terong ini ada pengelola yaitu komunitas yang memang mereka mau sehingga atas dasar potensi itu la kita Dinas Pariwisata kita tinggal mendorong dan kita tinggal bantu dari apa yang mereka butuhkan misal dalam hal ini untuk pengembangan dari SDM atau sumber daya masyarakat yaitu pokdarwis atau komunitas-komunitas di desa terong tersebut” (wawancara, 7 januari 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu Dinas Pariwisata berkewajiban mendorong masyarakat dan membantu apa yang di butuhkan oleh masyarakat dalam menggali dan

mengembangkan semua potensi yang ada seperti pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan Desa Wisata Terong tersebut.

## 2. Swasta

Peran swasta terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyadari pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menawarkan keindahan alam yang memukau, salah satunya yang berada di Bangka Belitung.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama untuk menumbuh kembangkan desa wisata. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program Bakti BCA *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan pariwisata berkualitas di Indonesia dengan membina sejumlah desa/komunitas di pelosok Tanah Air. salah satunya Desa Wisata Terong, Kabupaten Belitung. adapun keterlibatan swasta dalam hal yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam wawancara tertulis yaitu

“BCA menginisiasi beragam program pelatihan sebagai salah satu wadah untuk semakin memperkaya pengetahuan maupun kompetensi setiap individu di Desa Wisata Terong agar dapat berkomunikasi secara asertif dalam pemenuhan kepentingan bersama. Selain itu menciptakan masyarakat yang mampu bertumbuh dan mandiri” (wawancara tertulis)

Dari hasil wawancara tertulis tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa keterlibatan swasta dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini yaitu dengan memberikan pelatihan dan fasilitas kepada Desa Wisata

Terong ini dengan harapan bahwa dengan adanya keterlibatan pihak swasta mampu meningkatkan kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Terong. Selain itu peran keterlibatan swasta dalam pengelolaan Desa Terong ini juga mampu menjadikan masyarakat yang ada di Desa Wisata Terong menjadi masyarakat yang tumbuh dan berkembang mandiri sebagai desa wisata.

### 3. Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Terong sudah tidak bisa diragukan lagi. Keterlibatan masyarakat dalam pada pengelolaan Desa Wisata Terong tidak lepas dari masyarakat yang sadar wisata dan potensi yang dimiliki dari Desa Terong itu sendiri. Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan desa wisata, terlebih dalam pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Terong, karena pada dasarnya pengelolaan desa wisata Terong terdiri dari tiga pilar yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Terong. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini tidak lepas dari peran masyarakat yang sadar wisata yang tergabung dalam beberapa komunitas.

Sebagaimana yang di katakan oleh bapak Iswandi selaku *Person in charge* (PIC) dalam pengelolan Desa Wisata Terong mengatakan :

“dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini dengan konsep sebagus apapun sebuah program apabila masyarakat lokal tidak di berikan

pemahaman dan merubah pola pikir masyarakat maka itu tidak akan pernah berhasil, maka dari itu masyarakat di berikan pemahaman serta mengajak peran serta masyarakat dalam segala macam profesi masyarakat yang ada di Desa Terong untuk di pariwisataakan” (wawancara, 23 Desember 2019)

Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Terong ini merupakan murni dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui dengan memberikan pemahaman dan merubah pola pikir masyarakat untuk sadar wisata selain itu peran serta masyarakat yang di berikan pemahaman di lakukan dengan memberikan pendekatan kepada masyarakat untuk seluruh profesi yang ada untuk di pariwisataakan.

Adapun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini yaitu adanya komunitas-komunitas yang ikut terlibat dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Terong seperti yang dikatakan oleh ibu Fajar selaku sekretaris pokdarwis dalam wawancara sebagai berikut :

“ keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini yaitu ada terdapat 4 komunitas-komunitas yang ada di Desa Terong yaitu, yang pertama berawal dari Komunitas Aik Rusa Berehun Itu, awalnya sekitar tahun 2013 atau 2014 itu masyarakat memulai yang awalnya di Aik Rusa Berehun merupakan bekas lahan tambang timah, yang oleh masyarakat sekitar itu mereka mulai gotong royong membenahi lahan bekas tambang timah tersebut menjadi obyek wisata kemudian di ikuti oleh komunitas-komunitas lainya yaitu Komunitas Bukit Tebalu Simpor Laki, Komunitas Agrowisata Yaitu Kelompok Tani Desa Wisata Terong, dan Komunitas Hkm Mangrove” (wawancara, 23 desember 2019).

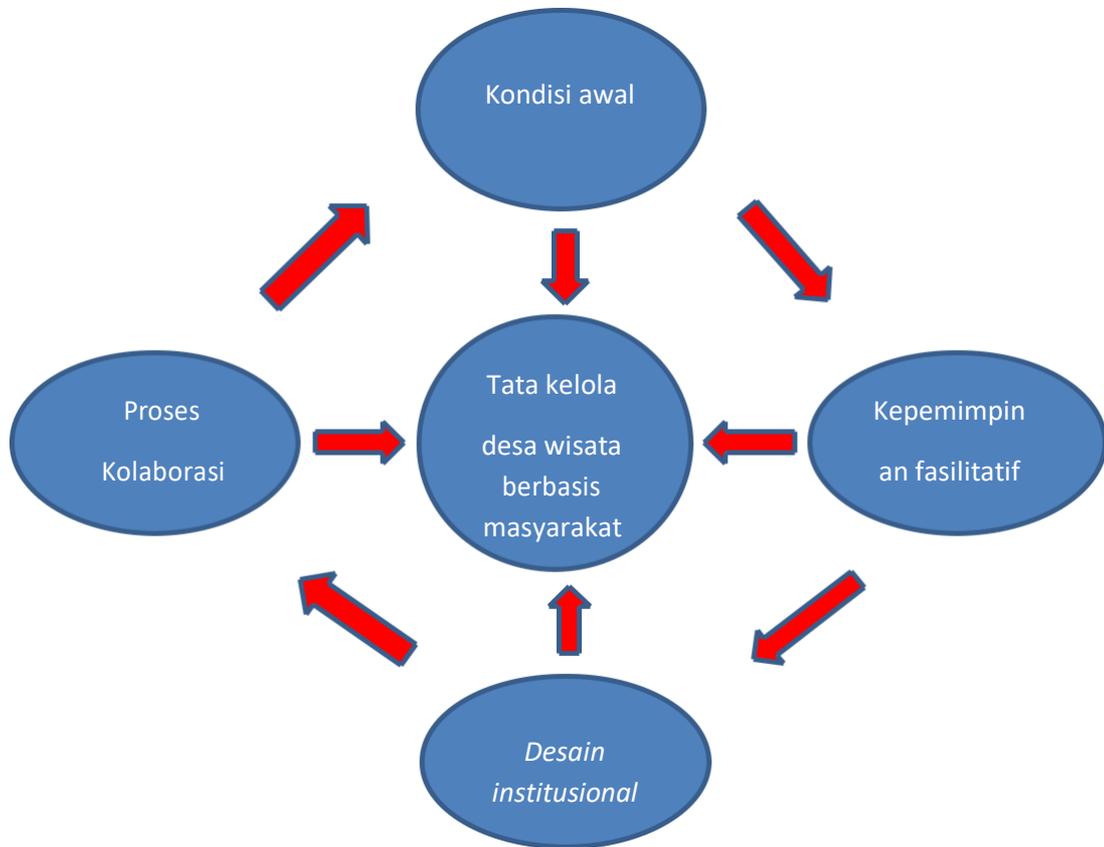
Dari pemaparan hasil wawancara tersebut yaitu bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu ada peran masyarakat yang sadar pariwisata yang dari masyarakat tergabung dalam

beberapa komunitas sadar wisata adapun komunitas-komunitas tersebut pertama yaitu komunitas aik rusa berehun yaitu dengan produk wisata pemamfaatan bekas lahan tambang timah menjadi destinasi wisata, kedua Komunitas Bukit Tebalu Simpor Laki yaitu dengan produk wisata alam, ketiga Komunitas Agrowisata yaitu kelompok tani yang menjual paket wisata pertanian dan ke empat yaitu Komunitas Hkm Mangrove dengan produk wisata aktraksi seperti ngenderik, ngeremis, *volly* pantai, sepak bola dan bermain perahu jungkong.

Dari peran ketiga stakeholder tersebut dalam konsep Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dalam Perpektif *Collaborative Governance* dapat di jelaskan dengan indentifikasi secara konseptual, maka yang menjadi karateristik dalam *collaborative Governance* yaitu *starting condition* (tahap awal), kepemimpinan fasilitatif, *institutional design* (desain institusional), dan proses kolaborasi.

### Bagan 3.1

#### Model pengelolaan tata kelola desa wisata berbasis masyarakat



Sumber : diolah penulis, 2019

Untuk memahami konseptual dari perspektif *collaborative governance* dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat maka dapat dijabarkan secara mendalam, untuk memahami konseptual tersebut maka dapat di jelaskan dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Adapun konseptual tersebut yaitu sebagai berikut :

### 3.1 *Starting Condition* (kondisi awal)

Kolaborasi dalam kondisi awal yaitu suatu tahap *collaborative* yang dilaksanakan, pada pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Terong, tahap awal yang dilakukan oleh para stakeholder yang bersangkutan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu dengan sesuai dengan tujuan dari masing- masing stakeholder yaitu mendorong sektor pariwisata sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki.

#### 3.1.1 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( pemerintah )

Kondisi awal yang melatar belakangi kolaborasi dari pihak pemerintah pada pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu sesuai dengan tanggung jawab untuk mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan Destinasi pariwisata dan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Desa Wisata terong.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Annita yaitu :

“Dinas Pariwisata sebagai lembaga instansi pemerintahan bertanggung jawab untuk mengembangkan desa wisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Dinas Pariwisata bertugas untuk mencari potensi-potensi desa sesuai dengan program Tunesa yaitu satu desa satu destinasi wisata dimana dengan potensi-potensi yang ada di desa tersebut untuk di kembangkan menjadi desa wisata yang ternyata dari sekian banyak desa di Kabupaten Belitung ini, Desa Terong yang memiliki banyak potensi sebagai Desa Wisata” (wawancara, 7 Desember 2020)

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata sebagai instansi pemerintahan yang mendapat arahan sesuai dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten

Belitung yaitu program Tunase atau satu desa satu destinasi berkewajiban untuk mencari potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Belitung untuk di kembangkan dan digali menjadi desa wisata yang diantara desa-desa yang ada di Kabupaten Belitung yaitu Desa Terong terpilih menjadi desa wisata dikarenakan Desa Terong memiliki banyak potensi yang cocok untuk dikembangkan dan didorong untuk menjadi desa wisata.

Adapun Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Desa Wisata Terong mereka berkewajiban untuk membantu dan mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Terong seperti halnya yang dikatakan oleh bu Annita selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dalam wawancara yaitu :

“kemudian di Desa Terong juga terdapat pengelola yang memang mereka mau untuk di pariwisataakan, sehingga atas dasar potensi yang ada, Dinas Pariwisata mendorong komunitas-komunitas tersebut dan membantu apa yang mereka butuhkan, misal pengembangan sumber daya manusia (SDM) dimasyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong tersebut” (wawancara, 23 Desember 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang Dinas Pariwisata sebagai pemerintah melakukan kolaborasi pada pengelolaan Desa Terong merupakan sebagai bentuk untuk mendorong sektor pariwisata serta bertanggung jawab dan mendukung Desa Wisata Terong dengan berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Desa Wisata Terong.

### 3.1.2 Bank BCA ( Swasta )

Keterlibatan swasta dalam kolaborasi pada pengelolaan Desa Wisata Terong ini dengan tujuan dalam rangka mendorong sektor pariwisata sehingga pada kondisi awal bank BCA ( swasta ) pada tahun 2018 *Corporate Social Responsibility* (CSR) masuk dalam hal peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan juga peningkatan sarana wisata.

Berdasarkan wawancara tertulis yaitu :

“bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program Bakti BCA(CSR) berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan pariwisata berkualitas di Indonesia dengan membina sejumlah desa/komunitas di pelosok Tanah Air. salah satunya Desa Wisata Terong” (wawancara tertulis)

Dari hasil wawancara tertulis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keterlibatan swasta dalam hal ini yaitu Bank BCA pada kondisi awal yaitu dilatarbelakangi oleh tujuan dalam mendorong sektor pariwisata di Indonesia melalui program bakti BCA *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun keterlibatan swasta dalam pengelolaan desa wisata terong ini yaitu dengan melakukan pelatihan. berdasarkan wawancara tertulis dengan bapak jeky yaitu :

“BCA menginisiasi beragam program pelatihan sebagai salah satu wadah untuk semakin memperkaya pengetahuan maupun kompetensi setiap individu di Desa Wisata Terong agar dapat berkomunikasi secara asertif dalam pemenuhan kepentingan bersama”(Wawancara tertulis)

Dari hasil wawancara tertulis tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) selaku swasta yang ikut terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama untuk menumbuh kembangkan desa wisata sehingga

penting bagi pihak swasta dalam memberikan pelatihan pelatihan kepada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Desa wisata binaannya yaitu Desa Wisata Terong.

### 3.1.3 Masyarakat

Keterlibatan masyarakat pada kondisi awal kolaborasi yang dilakukan yaitu masyarakat mulai sadar akan pariwisata sehingga masyarakat mulai merubah pola pikir dan melihat potensi-potensi yang dimiliki dari desa mereka untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata hal ini merupakan salah satu tujuan dalam mendukung dan mengembangkan sektor pariwisata. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi pada kondisi awal yaitu Sebagaimana wawancara dengan bapak iswandi

“dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini sebagai apapun sebuah program apabila masyarakat lokal tidak di berikan pemahaman dan merubah pola pikir masyarakat maka itu tidak akan pernah berhasil, maka dari itu masyarakat merasa butuh di berikan pemahaman penguatan tentang bagaimana pengembangan SDM yang kemudian dari Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan memberikan penguatan tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) Dalam Pengelolaan Desa Wisata” (wawancara, 23 Desember 2019)

Kemudian peran keterlibatan masyarakat dalam kondisi awal ini yaitu pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu seperti halnya dalam keterbatasan masyarakat dalam memberikan kenyamanan terhadap pelayanan kepada wisatawan hal ini yang melatarbelakangi masyarakat merasa membutuhkan bagaimana cara melayani para wisatawan yang

datang seperti yang dikatakan pada saat wawancara dengan ibu Susanti sebagai pemilik *homestay* sebagai berikut :

“disini kami merasakan kurang dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang untuk menginap di *homestay* kami sehingga dari situ kami merasa membutuhkan semacam pelatihan guna mendukung kegiatan dalam memberikan pelayanan *homestay*, sehingga disini setelah mendengar segala keluhan kami maka seperti Dinas Pariwisata dan bank BCA ikut melaksanakan kegiatan pelatihan”

Dari hasil pemaparan wawancara diatas bahwa masyarakat merasa sangat membutuhkan berbagai macam pelatihan salah satu contohnya dalam pengelolaan *homestay* yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan bank BCA dalam mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Terong sehingga dari pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh beberapa stakeholder diharapkan dapat mampu memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang datang dan berkunjung serta menginap di *homestay* Desa Wisata Terong, Belitung.

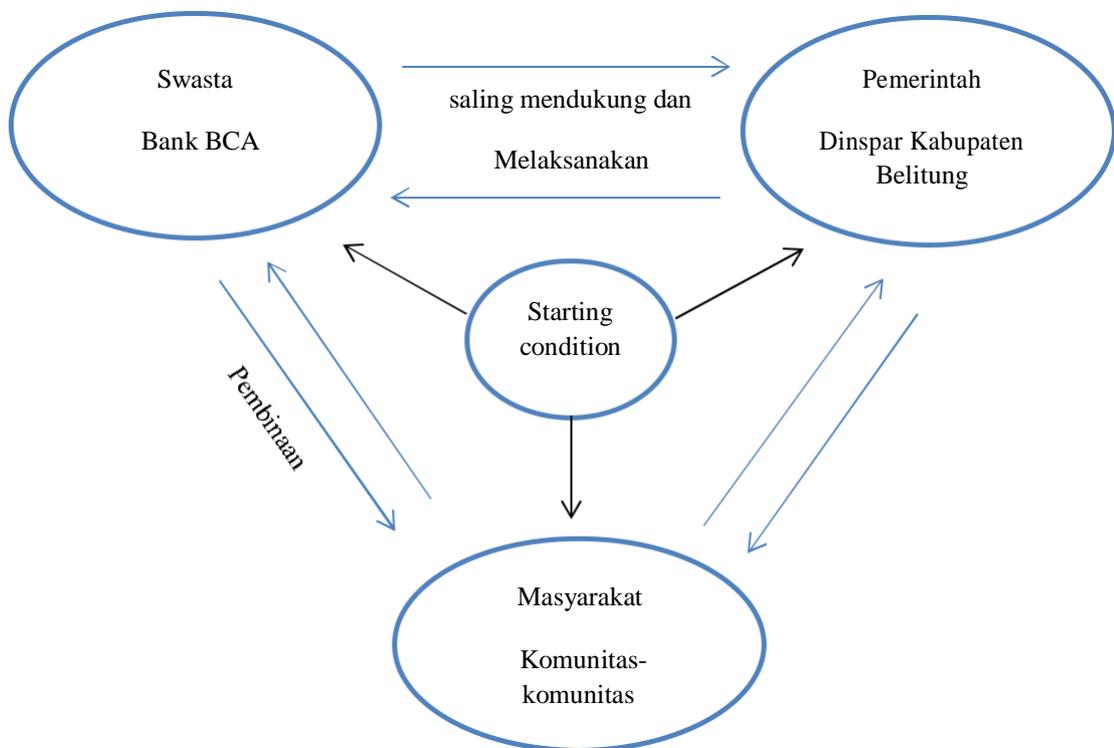
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi awal keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi yaitu bahwa pada awalnya masyarakat merasa membutuhkan pemahaman dan bagaimana pengembangan SDM dalam pengelolaan Desa Wisata Terong sehingga pemerintah dan swasta ikut terlibat dengan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam penguatan sumber daya manusia.

Jadi, *starting condition* atau kondisi awal bagaimana kolaborasi terjadi yaitu tercipta, karena kurangnya penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengelolaan Desa Wisata Terong sehingga

pemerintah, swasta dan masyarakat melakukan *collaborative Governance* dalam pengelolaan Desa Wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

### Bagan 3.2

#### Pola kolaborasi Starting Condition (kondisi awal)



Sumber : hasil temuan lapangan, 2020

Dari indentifikasi pola kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam *starting condition* atau kondisi awal menunjukan bahwa hubungan ketiga stakeholder tersebut saling merespon dalam hubungan kolaborasi. keterlibatan stakeholder dalam hubungan kolaborasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah yaitu Dinas Pariwisata berkewajiban untuk mengembangkan destinasi

pariwisata dengan mencari potensi-potensi yang ada di desa untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata serta menjadi fasilitator dalam pariwisata tersebut sedangkan pihak swasta terlibat dalam Desa Wisata Terong tersebut yaitu dalam mendukung pemerintah dalam sektor pariwisata yaitu dengan menjalankan program CSR (*corporate social responsibility*) yang di implementasikan BCA di desa binaannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memberikan bantuan berupa sarana parasana kemudian untuk keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu komunitas-komunitas yang ada mencoba untuk mengikuti dari kegiatan dari berbagai macam pelatihan yang di laksanakan oleh baik pemerintah maupun swasta.

### **3.2 *Fasilitative Leadership* (kepemimpinan fasilitatif)**

Kepemimpinan fasilitatif yaitu menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan seorang pemimpin dalam melakukan proses kolaborasi. Kepimpinan yang fasilitatif sangat dibutuhkan dalam proses kolaborasi karena merupakan sebagai ujung tombak tingkat keberhasilan suatu kolaborasi. Seorang pemimpin dalam proses kolaborasi harus memberikan fasilitas dalam memberikan kesempatan bagi setiap aktor untuk melakukan dialog serta membangun sebuah kepercayaan antar aktor dan juga menetapkan aturan-aturan dalam proses kolaborasi. Sukses atau tidaknya suatu kolaborasi tergantung pada setiap pemimpin untuk bisa dalam memamanajemenkan kolaborasi agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kepemimpinan dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan di Desa Wisata Terong ini yaitu Dinas Pariwisata sebagai aktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pariwisata memiliki peran penting serta tanggung jawab sebagai fasilitator dengan membina, menggerakkan serta melaksanakan pelatihan-pelatihan sebagaimana wawancara dengan bapak Susanto selaku Kabag Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

“bahwa sudah tanggung jawab pemerintah yaitu Dinas Pariwisata dalam melakukan pembinaan pelatihan serta sebagai fasilitator kepada stakeholder terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Terong ini” ( wawancara, 9 januari 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah keharusan bagi pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan dan memfasilitasi serta melakukan arahan, pelatihan dan pemberdayaan kepada para stakeholder

Fasilitas serta arahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat di respon oleh para stakeholder seperti keterlibatan pihak swasta yaitu BCA dalam hal ini yaitu membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kualitas pelayanan unggul kepada wisatawan serta beragam pelatihan- pelatihan dalam rangka mengembangkan potensi desa dengan beberapa pelatihan kepada masyarakat seperti layanan prima, standar layanan, *creative selling skill*, dan *golden heart leadership*.

Adapun Peran kepemimpinan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kolaborasi ini yaitu peran kepimpinan dari swasta yaitu BCA seperti tertulis dalam wawancara dengan bapak jeky yaitu :

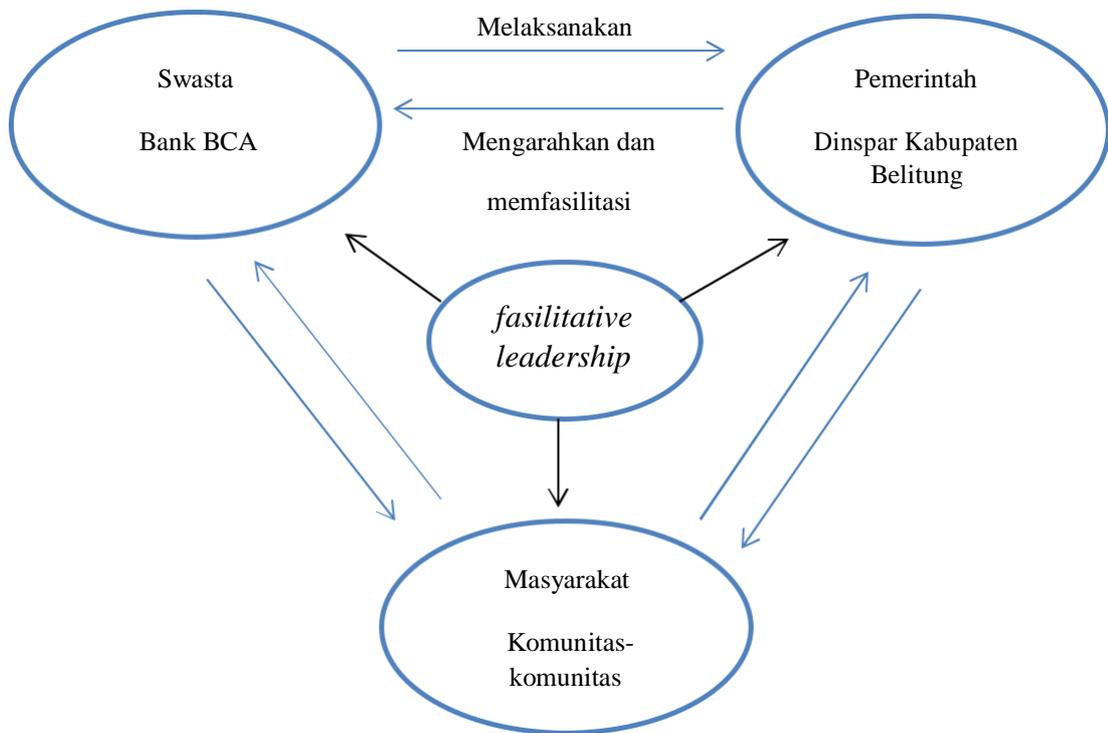
“Pemimpin BCA, bertindak selaku pembina, wajib memperhatikan potensi yg dimiliki desa serta mampu mengembangkan potensi itu melalui *platform* yang sesuai, salah satunya melalui pelatihan SDM. Pemimpin desa, selaku pihak yang dibina mau menerima arahan yang positif dan melakukannya bersama dengan pengurus Desa Wisata Terong” (wawancara tertulis).

Dari hasil wawancara tertulis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan pihak swasta dinilai sangat berpengaruh pada proses kolaborasi hal ini dapat dilihat dari peran kepemimpinan BCA yang berpengaruh pada pengembangan potensi desa wisata yang mampu di implementasikan oleh para pengurus Desa Wisata Terong .

Respon stakeholder dalam rangka mendukung serta membantu pemerintah dalam sektor kepariwisataan dari pihak masyarakat yaitu di wakili oleh komunitas-komunitas yang terlibat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik pemerintah maupun pihak swasta. Dari uraian keterlibatan stakeholder dalam kepemimpinan fasilitatif dalam proses kolaborasi ini peran kepemimpinan yang sangat dominan merupakan peran kepemimpinan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dalam tata kelola Desa Wisata Terong.

### Bagan 3.3

#### Pola kolaborasi *fasilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif)



Sumber : hasil temuan lapangan, 2020

Dari hasil indentifikasi pola kolaborasi *fasilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) yang dilakukan oleh ketiga stakeholder pada kepemimpinan yaitu dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih mendominasi dalam kepemimpinan fasilitatif yaitu pemerintah mencoba mengarahkan dan memfasilitasi seperti dalam hal mengarahkan pihak swasta terlibat dalam hal membantu dalam penguatan sumber daya manusia dalam mendukung sektor pariwisata serta memberikan fasilitas berupa pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan swasta.

### **3.3 Desain Institusional**

Setelah tahap *starting condition* atau kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif, maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam kolaborasi yaitu *desain institusional*, *desain institusional* yaitu merupakan suatu aturan dasar yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melihat legitimasi prosedural dalam pengelolaan proses kolaborasi, dengan mempunyai aturan yang jelas dan prosesnya terbuka.

Aturan dasar pada pengembangan pariwisata sangat penting yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola pariwisata. Adapun aturan-aturan dasar dalam melakukan pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Terong Tersebut seperti yang di jelaskan oleh ibu Natasha selaku Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dalam wawancara yaitu :

“untuk aturan-aturan yang mengikat dalam proses kolaborasi Desa Wisata Terong ini tidak ada, namun untuk pengembangan Desa wisata terong ini terdapat buku pedoman pengembangan Desa Wisata terbitan Kementerian Pariwisata.” (wawancara, 9 januari 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan untuk aturan dasar yang mengikat tentang proses kolaborasi antar stakeholder tidak ada dan hanya bersifat keterbukaan antar pihak, namun untuk pengelolaan Desa Wisata Terong ini terdapat suatu buku pedoman guna sebagai panduan dalam pengimplementasian di Desa Wisata Terong

Namun untuk proses kolaborasi antara masyarakat dan swasta mempunyai aturan yang jelas dan prosesnya terbuka dengan adanya saling berkomunikasi dan

koordinasi. Adapun perjanjian kerja sama Diatur dalam MOU yaitu Ruang lingkup antar pihak, Jangka waktu kesepakatan, Hak dan kewajiban para pihak, Pemberitahuan dan permintaan berkaitan dengan kesepakatan, Pengakhiran kesepakatan, Penyelesaian perselisihan dan lain-lain. Sehingga jelas bahwa dalam proses kolaborasi antara swasta dan masyarakat adanya aturan dalam proses kolaborasi yaitu MOU. Seperti yang dikatakan oleh pak iswandi selaku *Person in charge* (PIC) dalam wawancara sebagai berikut :

“bahwa sini kami dengan pihak BCA adanya perjanjian kerja sama MOU, yang prosedur dari yaitu pihak BCA mereka datang dan melakukan survei terlebih dahulu wawancara dan meminta data yang kemudian dari data tersebut mereka bawa ke Jakarta dan mereka pelajari terlebih dahulu kemudian sekitar sebulan maka dari pihak mereka ada memberi kabar keluar keputusan dan tanda tangan MOU, adapun sifat dari MOU ini bersifat sederhana dan tidak berlibet” (wawancara, 23 Desember 2019)

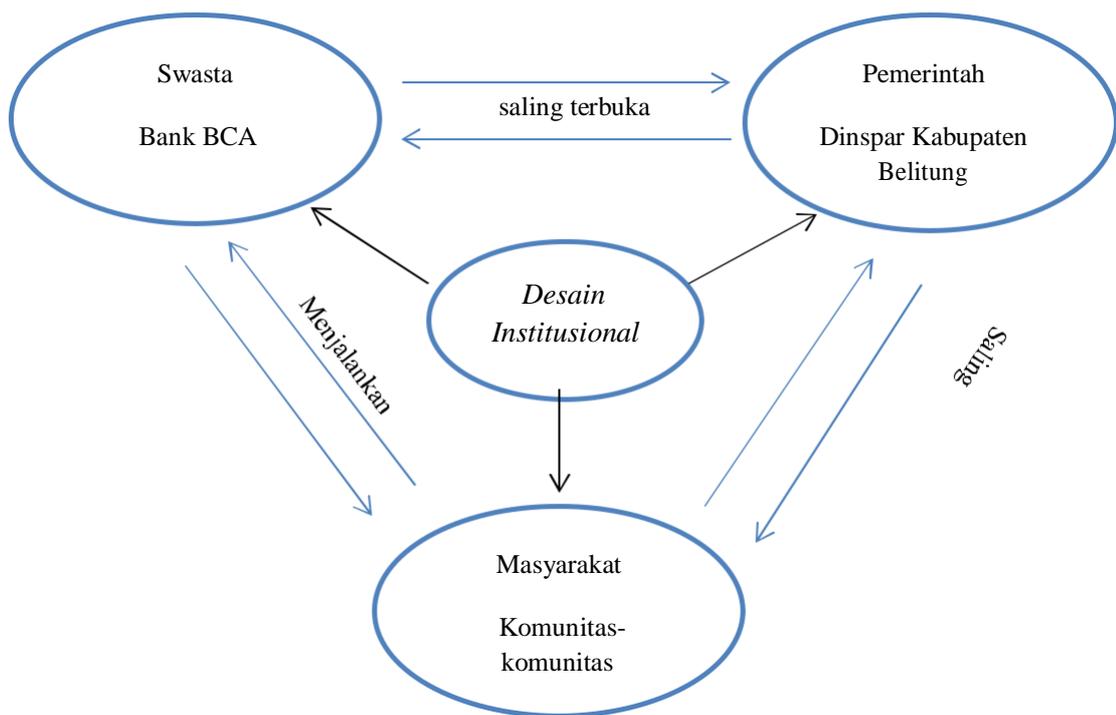
Dari pemaparan wawancara dengan bapak Iswandi bahwa prosedur perjanjian kerja sama atau MOU yang dilakukan antara masyarakat dengan pihak swasta yaitu BCA awal pertamanya yaitu pihak BCA datang dan melakukan survei secara langsung kepada masyarakat terkait dengan data-data yang ada dalam pengelolaan Desa Wisata Terong dan kemudian data yang mereka dapat mereka pelajari terlebih dahulu kemudian setelah diolah data-data tersebut keluar surat keputusan tentang penanda tangan MOU yang bersifat sederhana dan terbuka antara masyarakat dan pihak swasta yaitu BCA.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *desain institusional* dalam proses kolaborasi di Desa Wisata Terong ini terdapat perjanjian kerja sama antar stakeholder yang bersifat saling terbuka yaitu dengan adanya saling komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan swasta

sedangkan untuk aturan-aturan dalam proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yaitu saling terbuka dan adanya buku pedoman pengembangan desa wisata terbitan kementerian pariwisata yang digunakan dalam pengimplementasian di Desa Wisata Terong, sehingga dalam *desain institusional* pengeluaran aturan proses kolaborasi dilakukan oleh masing masing pihak-pihak dengan aturan-aturan yang bersifatnya terbuka.

**Bagan 3.4**

**Pola kolaborasi *Desain Institusional***



Sumber : hasil temuan lapangan, 2020

Dari hasil indentifikasi pola kolaborasi *Desain Institusional* yang dilakukan oleh ketiga stakeholder yaitu adanya peran pengeluaran aturan dari masing-masing pihak seperti halnya untuk pemerintah dan swasta hanya bersifat

saling terbuka sedangkan untuk kolaborasi pengeluaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat terbuka dan tidak ada aturan yang mengikat dalam kolaborasi yang dilakukan dan hanya berpegang pada buku pedoman terbitan Kementerian Pariwisata dan di implementasikan pada pengelolaan Desa Wisata Terong, sedangkan dalam pengeluaran aturan yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat yaitu adanya MOU atau perjanjian kerja sama yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam kolaborasi.

### **3.4 Proses Kolaborasi**

Setelah penjabaran dari kolaborasi antar stakeholder yang dimulai dari kolaborasi *starting condition* (kondisi awal), *fasilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *Desain Institusional*, maka untuk tahapan selanjutnya yaitu proses kolaborasi. Pada penjelasan pada pengelolaan Desa Wisata Terong yang dilakukan dari *collaborative governnace* yaitu meliputi :

- a. *Face to face* (dialog tatap muka)
- b. *Trust building* (membangun kepercayaan)
- c. *Commitment to process* (komitemen terhadap proses)
- d. *Share understanding* (pemahaman bersama)

Adapun untuk untuk memperjelas model pada tahan proses kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Terong dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 3.4.1 *Face to face* (dialog tatap muka)

*Face to face* atau dialog tatap muka langsung merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan proses kolaborasi Tata Kelola Desa Wisata Terong yang dilakukan oleh para stakeholder, Tanpa adanya pertemuan atau dialog secara langsung maka proses kolaborasi tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Pada pengelolaan Desa Wisata Terong dialog tatap muka langsung atau pertemuan yang diadakan secara langsung oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari rapat atau memberikan pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama atau langsung antar stakeholder.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Annita dalam wawancara

“pada saat memberikan pelatihan contoh seperti dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di implementasikan BCA melalui program solusi bisnis unggul dengan menggelar pelatihan standar layanan bagi pengurus desa wisata Terong maka disini turut hadir kepala dinas pariwisata kabupaten belitung dan jajarannya beserta para pengurus Desa Wisata terong” (wawancara, 7 januari 2020)

Berikut gambar pelatihan yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu bank BCA yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus hingga 29 Agustus 2018.

### **Gambar 3.1**

#### **Pelatihan standar layanan oleh BCA**



Sumber : netralitas.com, 2018

Dari gambar 3.1 Bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh bank BCA melalui program solusi bisnis unggul dengan menggelar pelatihan standar layanan yang di ikuti oleh beberapa pengurus Desa Wisata Terong yang diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pengurus desa wisata terong agar mampu memiliki standar dalam memberikan pelayanan baik ke para wisatawan lokal maupun mancanegara, pelatihan ini juga dilaksanakan dalam rangka partisipasi BCA dalam fungsi tanggung jawab sosial dalam mengembangkan bisnis di lingkungan komunitas maupun desa wisata yang dapat berkontribusi memakmurkan masyarakat daerah.

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pelatihan turut andil pihak stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong, seperti halnya dalam pelaksanaan pelatihan adanya saling koordinasi antara pihak swasta, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pelatihan seperti yang dikatakan oleh bapak Susanto dalam wawancara yaitu :

“ketika pihak swasta BCA telah berhasil melakukan pelatihan seperti contoh pelatihan standar layanan terhadap pengurus desa wisata binaan dalam hal ini Desa Wisata Terong maka pihak pemerintah akan melakukan sertifikasi, agar nantinya mereka bisa diakui dan diterapkan dalam pelayanan yang dilakukan di tempat mereka bekerja” (wawancara, 9 januari 2020)

dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan yaitu adanya saling koordinasi dan tatap muka secara langsung yang dilakukan oleh para stakeholder.

#### *3.4.2.Trust building* (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan yaitu bahwa pihak yang terlibat mempunyai niatan yang sama untuk mengambil suatu kebijakan yang terbaik untuk semua pihak (Anshel and Gash, 2007) *Trust building* dimulai dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Dalam proses kolaborasi membangun kepercayaan sangat dibutuhkan oleh para stakeholder dalam pengelolaan desa wisata terong ini, setiap stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi harus saling percaya, sehingga proses kolaborasi yang dijalankan oleh para stakeholder berjalan dengan

baik. Membangun sebuah kepercayaan yang dilakukan oleh para stakeholder yang terlibat pada pengelolaan Desa Wisata Terong ini yaitu adanya saling koordinasi dengan membangun sebuah komunikasi. Seperti yang di katakan oleh bapak Susanto dalam wawancara yaitu

“misalnya disini untuk menumbuhkan rasa saling percaya antar stakeholder pemerintah yaitu kami Dinas Pariwisata membuka forum *meeting* dengan stakeholder dalam peningkatan pariwisata di belitung yang mengundang masyarakat dan pihak swasta yang terlibat seperti disini misalnya swasta yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu pihak BCA” (wawancara, 9 januari 2020)

Dari hasil pemaparan hasil wawancara tersebut bahwa untuk membangun sebuah kepercayaan antara stakeholder Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab mengundang para stakeholder dalam *meeting* bersama dengan para stakeholder yang terlibat untuk membahas tentang bagaimana pengelolaan Desa Wisata Terong untuk lebih maju kedepannya serta kendala apa yang dihadapi serta masukan-masukan yang disampaikan oleh para stakeholder.

Terbangunnya sebuah kepercayaan antara stakeholder tidak lepas dari terjalinnya komunikasi yang intens yang dibangun oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong. Seperti dalam wawancara tertulis dengan pihak BCA yaitu :

“bahwa dalam membangun kepercayaan yaitu adanya Monitoring dan Evaluasi serta adanya Konsolidasi dalam pengelolaan desa wisata terong” ( wawancara tertulis)

Dari pemaparan diatas bahwa dalam membangun kepercayaan antara stakeholder yaitu adanya Proses terjadinya tatap muka secara langsung dan terjadinya komunikasi antara stakeholder dalam pengelolaan

Desa Wisata Terong berdampak pada keterbukaan dari masing-masing stakeholder sehingga memunculkan suatu kepercayaan yang terjadi antara stakeholder yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

#### *3.4.3 Commitment to process (komitmen terhadap proses)*

Setelah dialog tatap muka dan membangun kepercayaan maka tahap selanjutnya dalam proses kolaborasi pada Tata Kelola Desa Wisata Terong ini yaitu komitmen terhadap proses. Komitmen terhadap proses merupakan suatu komitmen yang dijalankan dalam pelaksanaan proses kolaborasi guna dalam mencapai suatu tujuan keinginan bersama oleh para stakeholder, dengan berbagi komitmen dan saling terbuka satu sama lain.

Komitmen dapat menentukan keberhasilan dalam proses kolaborasi yaitu bergantung pada kepada kepercayaan aktor terhadap aktor lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pada suatu kolaborasi. Seperti halnya swasta yaitu BCA dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan program bakti BCA merupakan suatu komitmen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam rangka mendorong sektor pariwisata. BCA merupakan sebagai aktor yang berperan sebagai mediator melalui volunteer atau sukarelawan sebagai pelaksana dilapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kebutuhan dalam pengelolaan Desa Wisata Terong, selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung juga mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong, hal ini dapat dilihat dari visi misi Dinas Pariwisata

Kabupaten Belitung. kemudian komitmen ini sudah menjadi kesadaran dinas sebagai pemerintah untuk memfasilitasi Desa Wisata Terong dengan melibatkan swasta dalam program yang dilakukan oleh BCA.

Begitupun komitmen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Terong secara tegas tertuang dengan adanya perjanjian kerja sama antara PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan pengelola Desa Wisata Terong. Segala komitmen yang secara tegas tertuang dalam perjanjian kerja sama seperti apa yang dijelaskan diatas bahwa segala prakteknya memang dijalankan sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh bapak Iswandi dalam wawancara sebagai berikut

“Adanya perjanjian kerja sama atau MOU, agar kita disini masyarakat berkomitmen dalam kolaborasi ini, komitmen dilakukan dengan cara MOU tersebut hanya untuk mengantisipasi penyalagunaan bantuan yang diberikan karena pertanggungjawaban CSR, seperti BCA mereka selalu meminta laporan perbulan tentang pendapatan terkait untuk monitoring dan evaluasi hasil dari bantuan mereka berikan” (wawancara, 23 Desember 2019)

Dari pemaparan pada hasil wawancara dengan bapak Iswandi terkait dengan komitmen yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak swasta yaitu dengan melakukan perjanjian kerja sama merupakan salah satunya agar tidak ada yang dirugikan dan untuk mengantisipasi terjadinya penyalagunaan dalam hal ini misalnya bantuan yang diberikan oleh CSR bank BCA kepada Desa Wisata Terong sehingga segala aturan yang ada antara masyarakat dan pihak swasta yaitu BCA tertuang dalam perjanjian kerja sama.

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Commitment to process* atau komitmen terhadap proses dalam *collaborative governance* pada pengelolaan Desa Wisata Terong ini muncul karena adanya saling percaya antar stakeholder baik itu dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

#### 3.4.4 *Share understanding* (pemahaman bersama)

*Share understanding* atau pemahaman bersama merupakan suatu sikap yang sangat penting karena dalam menjalankan beberapa proses kolaborasi dibutuhkan sikap saling memahami agar cita-cita dari bentuknya kolaborasi dapat tercapai. *Share understanding* atau pemahaman bersama sangatlah krusial apalagi dalam *collaborative governance*, hal ini dikarenakan aktor-aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat berasal dari berbagai bidang dengan masing-masing pemikiran yang berbeda-beda.

*collaborative governance* dalam tata kelola Desa Wisata Terong dimana aktor-aktor yang terlibat mempunyai perbedaan bidang pengetahuan dan sumber daya. Kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder sangat jelas mempunyai spesifikasi pada masing-masing dirinya, sehingga diperlukan sikap untuk saling memahami dalam melaksanakan proses kolaborasi. Adapun sikap saling memahami indetik dengan adanya komunikasi yang terjalin, dengan komunikasi inilah semua stakeholder akan saling berbagi informasi dan pengetahuan dalam proses

kolaborasi seperti halnya adanya komunikasi yang dilakukan biasanya berbagi informasi dalam acara rapat koordinasi, monev, seperti yang di jelaskan dalam wawancara tertulis yaitu :

“kami akan melakukan monev Monitoring dan Evaluasi minimal 2x dalam setahun dan melakukan Konsolidasi baik dengan pihak pemerintahan maupun masyarakat” (wawancara tertulis)

dari kesimpulan pada hasil wawancara tersebut bahwa adanya komunikasi yang baik terjalin antar stakeholder serta meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan para stakeholder dalam melakukan hubungan kerja sama dalam pengelolaan Desa Wisata Terong.

**Tabel 3.1**

**Tabel Resume Hasil Penelitian**

No	Indikator	Uraian Temuan
1.	<i>Starting condition</i> (kondisi awal)	Tata Kelola Desa Wisata Terong pada tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu sesuai dengan tujuan dari masing-masing stakeholder yaitu mendorong sektor pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki hal ini dilihat dari kondisi awal ketiga stakeholder tersebut yaitu pemerintah merupakan sudah kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mendorong dan mengembangkan destinasi pariwisata sebagai fasilitator dalam Tata Kelola Desa Wisata Terong ini sedangkan pihak swasta terlibat pada kondisi awal yaitu mendukung sektor pariwisata dengan melaksanakan program CSR ( <i>corporate social responsibility</i> ) kemudian untuk keterlibatan masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dalam pengembangan Desa Wisata Terong untuk lebih maju.
2.	Kepemimpinan fasilitatif	Kepemimpinan fasilitatif dalam Tata Kelola Desa Wisata Terong oleh ketiga stakeholder tersebut yaitu pemerintah sebagai aktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pariwisata memiliki peran penting serta bertanggungjawab sebagai fasilitator dengan membina dan mengarahkan para stakeholder yaitu swasta dan masyarakat mampu merespon dan melaksanakan segala arahan yang diberikan oleh pemerintah sebagai suatu instansi yang berperan penting dalam kepemimpinan pada proses kolaborasi Tata Kelola Desa Wisata Terong.
3.	<i>Desain institusional</i>	<i>Desain institusional</i> pada Tata Kelola Desa Wisata Terong oleh para stakeholder yaitu pemerintah itu sendiri pada pengeluaran atauran yaitu hanya bersifat terbuka tidak aturan yang mengikat pada proses kolaborasi namun untuk swasta dan masyarakat terdapat aturan yang dilakukan pada yaitu adanya perjanjian kerja sama atau MOU yang disepakati antar kedua belah pihak yang dilaksanakan secara bersama dalam kolaborasi antara pihak swasta dan masyarakat.
4.	Proses kolaborasi	Proses kolaborasi dalam Tata Kelola Desa Wisata Terong ini yaitu pertama, adanya <i>face to face</i> atau dialog tatap muka hal ini seperti adanya pertemuan

		<p>secara langsung seperti pada saat melakukan meeting bersama dengan para stakeholder melakukan pelatihan yang dihadiri oleh para stakeholder terkait merupakan adanya saling koordinasi dan tatap muka secara langsung pada saat melakukan proses kolaborasi. Kedua yaitu <i>trust building</i> atau membangun kepercayaan dalam hal ini yang dilakukan oleh para stakeholder yaitu adanya saling koordinasi dengan membangun sebuah komunikasi merupakan salah satu dalam menumbuhkan kepercayaan antar para stakeholder yang bersangkutan. Ketiga, <i>commitment to process</i> atau komitmen terhadap proses, komitmen dapat menentukan keberhasilan dalam proses kolaborasi yaitu tergantung pada kepercayaan yang dibangun antar stakeholder seperti dalam hal ini pemerintah mempunyai komitmen dalam memajukan sektor pariwisata kemudian swasta berkomitmen melaksanakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam rangka mendorong sektor pariwisata Indonesia yang di implemetasikan dalam desa binaanya kemudian untuk komitmen dari masyarakatnya itu sendiri yaitu terlihat dalam perjanjian kerja sama atau MOU yang dilaksanakan dan disepakati secara bersama-sama kemudian keempat yaitu, <i>share understanding</i> atau pemahaman bersama merupakan indentik dengan adanya komunikasi yang terjalin antara stakeholder dalam hal ini yaitu adanya berbagi informasi seperti dalam acara rapat koordinasi kemudian pada saat melakukan monitoring dan evaluasi yang diadakan minimal 2x dalam setahun hal tersebut merupakan adanya saling komunikasi antar stakeholder dalam melakukan hubungan kerja dalam proses kolaborasi dalam Tata Kelola Desa Wisata Terong.</p>
--	--	---